

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu instrumen utama pembangunan di tingkat lokal sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor ketahanan pangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait kurang optimalnya pemanfaatan Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Program yang telah direncanakan kerap belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan produksi pertanian maupun kesejahteraan petani. Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam merancang program yang tepat sasaran, minimnya pemahaman regulasi, serta terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi menyebabkan pengelolaan Dana Desa sering kali belum efektif untuk menjawab kebutuhan strategis desa, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis pangan di tengah perubahan iklim dan tekanan ekonomi global.

Berdasarkan data yang ada, Desa Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp1.121.767.000 pada tahun 2023 dan Rp851.164.000 pada tahun 2024, dengan sekitar 20% dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Meskipun demikian, realisasi anggaran tersebut belum optimal dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian maupun daya tahan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan alokasi anggaran dan capaian di lapangan. Padahal, sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, ketahanan pangan menjadi sektor prioritas penggunaan Dana Desa. Hal ini menegaskan bahwa tantangan implementasi tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi juga pada bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaannya.

Permasalahan tersebut dapat ditinjau melalui beberapa perspektif teori. Konsep *Good Governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa (Mardiasmo, 2006; Dwiyanto, 2005). Teori Partisipasi Masyarakat juga menggarisbawahi bahwa

Anisa Oktavia, 2025

KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENGOPTIMALKAN KETAHANAN PANGAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan desa dapat menciptakan rasa memiliki dan kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan. Selain itu, teori *Collective Action* oleh Mancur Olson (1965) menjelaskan adanya hambatan partisipasi akibat fenomena *free rider problem*, yaitu kondisi ketika sebagian individu enggan berpartisipasi namun tetap ingin menikmati hasil pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan insentif, baik material maupun non-material, guna mendorong partisipasi sukarela warga. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa yang efektif mensyaratkan adanya kombinasi antara profesionalisme aparatur desa dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Di sisi lain, ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional, terutama pasca pandemi COVID-19 dan meningkatnya tekanan ekonomi global. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi. Kenaikan harga bahan pangan pokok, dampak fenomena El Niño, serta gangguan iklim telah menyebabkan turunnya produksi pertanian di berbagai wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023, sektor pertanian mengalami penurunan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sementara harga beras mengalami inflasi hingga 13,8% secara tahunan (BPS, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa krisis pangan bukan hanya ancaman global, tetapi juga menjadi persoalan nyata di tingkat lokal, khususnya desa yang merupakan basis utama produksi pangan nasional.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui program Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal, termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan. Pemerintah desa diberi kewenangan penuh untuk merancang serta mengelola program sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu kinerja aparatur pemerintah desa dan tingkat partisipasi masyarakat. Kedua elemen

ini menjadi penentu keberhasilan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Nurcholis, 2011).

Dalam konteks Desa Cigalontang, lemahnya tata kelola Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan masih terlihat jelas. Walaupun memiliki potensi pertanian yang besar dan memperoleh alokasi dana yang cukup signifikan, program ketahanan pangan di desa ini belum optimal dalam meningkatkan produktivitas pertanian maupun kesejahteraan petani. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penyusunan program berbasis hasil, minimnya pemahaman terhadap regulasi penggunaan anggaran, serta terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi program. Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan partisipatif—yang menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan—belum sepenuhnya terwujud.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi Dana Desa untuk ketahanan pangan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola desa. Sari dan Wijaya (2023) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus program desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi laporan keuangan juga terbukti mampu meningkatkan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam era pasca pandemi dan krisis iklim global, desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk memperkuat ketahanan pangan lokal melalui tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Cigalontang berkontribusi terhadap optimalisasi ketahanan pangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat mengenai kondisi aktual di lapangan sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan tata kelola desa berbasis pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dengan judul *“Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan*

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Mengoptimalkan Ketahanan Pangan di Desa Cigalontang.” Judul ini dipandang relevan karena pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang mendorong terwujudnya *good governance*, sekaligus memperkuat kinerja aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang sebagai dasar dari fokus penelitian, peneliti perlu merumuskan rumusan masalah untuk memperjelas arah dan batasan studi yang dilakukan. Rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman dalam mengkaji permasalahan secara terarah, sistematis, dan mendalam. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan?
2. bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan?
3. bagaimana hambatan serta solusi dari aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja aparatur pemerintah desa dan peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan.
3. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dari aparatur pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan pembangunan desa. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur terkait tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam kaitannya dengan kinerja aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran publik. Hasil penelitian ini juga mendukung dan menguji relevansi konsep-konsep seperti *good governance*, *community participation*, terutama dalam konteks penguatan ketahanan pangan di tingkat lokal.

1.4.2 Segi Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah daerah, dinas terkait, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran terkait pengelolaan Dana Desa. Temuan penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah berjalan dan merancang strategi penguatan kapasitas aparatur desa serta pelibatan masyarakat secara lebih sistemik. Selain itu, hasil penelitian dapat mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi pelengkap yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program ketahanan pangan berbasis desa.

1.4.3 Segi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran konkret mengenai kondisi faktual pelaksanaan program Dana Desa di Desa Cigalontang, khususnya pada aspek pertanian dan ketahanan pangan, diantaranya:

- 1) Diketuainya kinerja aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan.
- 2) Diketuainya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan.
- 3) Diketuainya hambatan serta solusi dari aparat pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan desa untuk mengoptimalkan ketahanan pangan.

. Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi kegiatan pelatihan dan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Dalam konteks isu sosial, penelitian ini mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan desa sebagai wujud tanggung jawab kewarganegaraan. Penelitian ini juga mendorong terbentuknya ruang dialog antara pemerintah dan warga desa untuk memperkuat hubungan sosial yang partisipatif dan berkeadilan. Dari sisi aksi sosial, temuan penelitian ini dapat memantik gerakan masyarakat sipil dan organisasi lokal untuk terlibat dalam pengawasan penggunaan Dana Desa serta mendukung aksi kolektif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis solidaritas sosial dan nilai kemandirian lokal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini berada dalam ranah studi pemerintahan desa dan pembangunan partisipatif, dengan titik tekan pada pengelolaan Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat desa. Penjabaran ruang lingkupnya sebagai berikut:

1.5.1 Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah:

- a) Aparatur Pemerintah Desa: termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan perangkat lainnya yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa.
- b) Masyarakat Desa: warga Desa Cigalontang, khususnya kelompok tani, tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta warga yang terlibat atau terdampak dalam program ketahanan pangan desa.

1.5.2 Objek Kajian

Objek kajian penelitian ini mencakup:

- a) Kinerja aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ketahanan pangan.
- b) Peran serta masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari partisipasi dalam musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan penilaian program.
- c) Program ketahanan pangan sebagai sektor prioritas Dana Desa yang menjadi fokus utama penelitian ini, termasuk kegiatan pertanian, penyediaan bibit, pelatihan petani, dan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cigalontang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan potensi pertanian desa yang besar serta alokasi Dana Desa yang signifikan untuk sektor ketahanan pangan, namun dengan tantangan implementatif yang nyata di lapangan.

1.5.4 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu semester genap tahun akademik 2024, dengan kajian data yang mengacu pada program Dana Desa tahun anggaran 2023 dan 2024.

1.5.5 Batasan Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar, penelitian ini tidak mengkaji seluruh aspek pembangunan desa secara keseluruhan, melainkan difokuskan hanya pada sektor ketahanan pangan. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif atau statistik, tetapi lebih pada pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, kinerja, dan partisipasi di tingkat desa.